

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, (2002), *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Grafindo Persada, Jakarta.

Kanter, E.Y., dan S.R.

....., Mei (2014), *Tindak Pidana Pemalsuan*, Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

....., *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang,
2006

....., (2015), *Tindak Pidana Pemalsuan Tindak Pidana yang Menyerang
Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi
Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Sinar
Grafika, Jakarta, 2009

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan kejahatan*, Jakarta: Prenada Media, 2008.

Boedi Harsono, (2003), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan
UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan*, Jakarta: Djambatan.

Hamzah, Jur dan Andi. (2015) *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam
KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang, P.A.F. 2009. *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan*

umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta.

Mulyana. Yusep, (2023), Hukum Pidana Baru Di Indonesia KUHP No. 1 Tahun 2023. Jawa Timur: Cendekiawan Indonesia Timur.

Murad, Rusmadi, 1997, Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktik, Cetakan I, Mandar Maju, Jakarta

Natsir. Jufri dan Ruslan. (2021), Pemalsuan Surat Tanah Rinci dan Sanksi Tindak Pidana. Sulawesi Selatan: Pusaka Almailda.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1998

Yahya Harahap M., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Undang – Undang

Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang – Undang No. 8 Tahun 1891 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHAPer)

Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA).

Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012

tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Jurnal

Abdul, Hakim, Y, L, M. (2023). Analisis Yuridis Pemalsuan Dokumen Tanah Di Deli

Serdang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1871/Pid.B/2022/PN.Lbp) . *Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.5, No. 3 (September)*.

Anhar. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan

Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 12/Pid.B/2009/PN.Pl . *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, No.1 (Juni)*.

Cahya, Andika, M, W, N. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Manipulasi Data

Kependudukan Dikabupaten Malaka. *Jurnal Lawnesia, Vol.1, No.9 (Desember)*.

Christianti, Hwian. (2010). Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif Dalam

Hukum Pidana. *Pamator, Vol.3, No.2 (Oktober)*,

Cita, Ray, K. (2024). Tindak Pidana Pemalsuan Surat. *Journal Publicuho, Vol.7, No.1*

(Februari – April),

Eko Adi, G, M. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu

- Ditinjau Dari Pasal 263 ayat (2) KUHP. *Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, No. 1 (Maret)*.
- Fatika, S. & Y. W. (2020) Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah. *IJCLC Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.1 No. 3 (November), 149 – 154*.
- Febryan Nur, Yeni, T, R. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris. *Jurnal Media Of Law And Sharia, Vo. 1, No.1 (Desember)*.
- Fernandes, R, E. (2014). Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol.1, No. 1*,
- Fikry, L. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Tahkim, Vol.XV, No. 1 (Juni)*.
- Franky Hotman, S. (2020). Tata Cara Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga. *Jurnal printegrita, Vol. 4, No. 1 (April)*.
- Mulyana, Y & T. M. O. (2022) Penyuluhan Tentang Eksistensi Dan Fungsi Tanah Carik Yang Dialihfungsikan Tanpa Hak Di Kabupaten Garut. *JPM Jurnal Pengabdian Mandiri, Vol.1 No. 3 (Maret), 437*.
- (2022) Sosialisasi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Bisnis Berkedokan Yang Menerapkan Skema Piramida. *JPDSH Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, Vol.1 No. 10 (Oktober), 2329*.
- Octaviyanti, Dian, D, S. (2022). Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah Ditinjau

Dari Pasal 263 dan 264 KUHP. *Bhakti Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vo.1, No. 1 (Januari)*.

- Regina, Alvi, H, T. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Pegawai Notaris (Studi Putusan PN Karanganyar No.36/Pid.B/2021/PN.KRG). *Jurnal Normatif, Vol.3, No.1(Mei)*,
- Rena Yulia, Dadang, H, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No.3 (Oktober)*.
- Riska, S. A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Digunakan Sebagai Dasar Pengajuan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. *JOURNAL UNITOMO kajian hukum dan keadilan, Vol.1, (Oktober)*,
- Rizka, P. & I. K. (2021).Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sebagai Jaminan Kredit Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh . *JIM Bidang Hukum Pidana, Vol.5, No.(Agustus)*, 481–488.
- Zulfa, Eva. (2018). Menghancurkan Kepalsuan (Studi Tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapannya). *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.48, No. 2 (Januari)*.

Sumber Lain

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20203/SKRIPSI%20MHD20KHOIRI%20SYAHDAN%20NUR.pdf?sequence=1> Diakses pada 20 November 2023.

<https://media.neliti.com/media/publications/183989-ID-penyidikan-tindak-pidana-pemalsuan-surat.pdf> Diakses pada 25 November 2023.

<http://repository.narotama.ac.id/1145/4/Bab%20I.pdf> Diakses pada 27 November 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen-lt54340fa96fb6c/> Diakses pada 9 Mei 2024.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mau-melaporkan-tindak-pidana-ke-polisi-begini-prosedurnya-lt504d52481c208/> Diakses Pada 9 Mei 2024

<https://hukum.uma.ac.id/2021/11/11/cara-serta-prosedur-melaporkan-tindak-pidana-ke-kepolisian/> Diakses Pada 10 Mei 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jadi-korban-tindak-pidana-penggelapan-lakukan-langkah-ini-lt5daa75e2a4d26/> Diakses pada 10 Mei 2024

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-372-kuhp-tentang-penggelapan-dan-unsurnya-lt659be4526e0f9/> Diakses Pada 11 Mei 2024